

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Strategi

1. Pengertian Strategi

Kata “Strategi” berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu *strategos* yang dapat diterjemahkan sebagai komandan militer pada zaman demokrasi Athena. Pengertian strategi menurut Siagian (2012:17) adalah rencana berskala besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya di arahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Menurut *Webster New World Dictionary* (dalam Udaya dkk, 2013: 6), strategi adalah;

1. Ilmu merencanakan serta mengarahkan kegiatan-kegiatan militer dalam skala besar dan memanuver kekuatan-kekuatan ke dalam posisi yang paling menguntungkan sebelum bertempur dengan musuhnya,
2. Sebuah keterampilan dalam mengelola atau merencanakan suatu strategem atau cara yang cerdas untuk mencapai suatu tujuan.

Definisi berbeda dari pendapat Wit dan Meyer (dalam Udaya dkk, 2013:6) yang mengatakan bahwa strategi harus dilihat dan dipahami berdasarkan tiga dimensi, yaitu *prosess*, *content*, dan *context*.

1. Strategy process

Cara bagaimana strategi-strategi timbul, dimana letak *strategy process* (atau strategimen proses) , proses strategi menyangkut bagaimana, siapa, dan bilamana strategi itu sendiri; bagaimana strategi tersebut, dan bagaimana seharusnya strategi itu dibuat, di analisis, dibentuk,

diformulasi, diimplementasi, diubah, dan dikontrol; siapa yang tersangkut; kapankah kegiatan-kegiatan yang diperlukan.

2. *Strategi content*

Hasil/produk proses strategi disebut *strategy content*. Jika dinyatakan sebagai sebuah pertanyaan, *strategy content* berhubungan dengan apa dari strategi, apa itu strategi, dan bagaimana isi yang seharusnya dari strategi tersebut bagi perusahaan serta untuk unitnya masing-masing.

3. *Strategy context*

sekumpulan keadaan berbagai proses strategi dan *strategy content* ditentuka disebut *strategy context*. Bila dinyatakan sebuah pertanyaan, *strategy content* tersebut terkait dengan dimana strategi berada; di perusahaan mana dan di lingkungan apa proses strategi dan *strategy content* itu ada.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah sebuah keterampilan yang merencanakan suatu strategi dengan skala besar yang berorientasi jangka panjang dengan memanuver kekuatan-kekuatan kedalam posisi yang menguntungkan dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang di arahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

2. Konsep Manajemen Strategi

Menurut Susanto (2014:2) manajemen strategik adalah suatu proses untuk menentukan arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang beserta pemilihan metode untuk mencapinya melalui pengembangan formulasi strategi dan implementasi yang terencana secara sistematis. Istilah manajemen strategik berasal dari dua kata yaitu “manajemen” dan “strategi”. Sedangkan kata strategik adalah kata sifat dari kata strategi. Dalam pengertian perusahaan (korporasi), manajemen merupakan individu atau sekelompok orang yang bertanggung jawab menganalisis dan mencapai tujuan organisasi. Sebagai kelompok fungsi,

manajemen mencakup fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penerapan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

Kata strategi diartikan sebagai keputusan dan tindakan untuk mencapai tujuan perusahaan pada setiap level organisasi. Kata sifat “strategik” memiliki asosiasi dengan istilah “tingkat tinggi”, “berdampak besar”, dan “bersifat jangka panjang”, ditambah lagi dengan suatu semangat untuk tidak mau didekte oleh keadaan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan manajemen strategik memiliki peran yang penting yaitu;

- a. Manajemen strategik membantu kita menangani ketidakpastian melalui suatu pendekatan yang sistematis,
- b. Manajemen strategik menyelaraskan tujuan antar unit dalam organisasi,
- c. Manajemen strategik membenahi peran setiap anggota organisasi,
- d. Manajemen strategik melatih penerapan budaya dan kepemimpinan, dan
- e. Manajemen strategik menjadi sarana komunikasi jangka panjang dan acuan bagi dewan direksi.

Manajemen strategik terdiri dari dua elemen, yaitu formulasi strategi dan implementasi strategi. Dalam formulasi strategi, organisasi menentukan visi dan misi, arah strategi, strategi, dan sasaran. Sedangkan dalam implementasi strategi ditetapkan struktur, SDM, dan sistem organisasi yang semua elemen ini harus ditopang oleh kepemimpinan dan budaya yang sesuai. Dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik melibatkan proses perencanaan, pengarahan,

pengorganisasian, dan pengendalian perusahaan terkait dengan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan strategi.

3. Manfaat Strategi

Penetapan strategi tentunya akan membawa manfaat bagi suatu organisasi. Strategi yang tepat akan mampu mencapai sasaran yang diinginkan oleh suatu organisasi. Siagian (2002:206) menjelaskan manfaat dari penetapan strategi pada organisasi antara lain :

1. Memperjelas makna dan hakikat suatu perencanaan dengan mengidentifikasi lebih spesifik tentang bagaimana organisasi harus mengelola hal-hal yang ada dimasa mendatang.
2. Strategi merupakan suatu cara efektif untuk merealisasikan kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang.
4. Mengetahui berbagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan pada suatu bidang sesuai kemampuan yang memiliki secara konkret dan jelas.
5. Sebagai proses penyelesaian permasalahan melalui serangkaian proses pengambilan keputusan.
6. Untuk mempermudah koordinasi bagi semua pihak yang berpartisipasi dan mempunyai persepsi yang sama tentang bentuk serta sifat interaksi, interdependensi dan interlasi yang harus tumbuh dan terpelihara dalam mengelola jalanya roda organisasi, sehingga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan timbulnya konflik antara berbagai pihak terkait. Dengan demikian strategi dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditetapkan.

Intinya manfaat penetapan strategi adalah memperjelas suatu perencanaan dengan mengidentifikasi lebih spesifik cara efektif serta merealisasikan kegiatan dalam rangka penetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan di berbagai bidang untuk mencapai tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan pada suatu bidang sesuai kemampuan yang memiliki secara konkret dan jelas. Strategi juga

sebagai cara penyelesaian masalah dengan pengambilan keputusan dengan cara mengkoordinasi dengan semua pihak yang berpartisipasi dan mempunyai persepsi yang sama.

4. Peranan Strategi

Dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan akan dilakukan guna pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Menurut Grant dalam Panjarwanto (2016:42) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen yaitu :

- a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan dan elemen untuk menuju sukses. Strategi merupakan suatu tema yang memberikan keputusan yang diambil oleh individu atau organisasi.
- b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi untuk memberikan kesamaan arah bagi perusahaan.
- c. Strategi sebagai target yang menggabungkan misi dan visi untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa yang akan datang. Penetapan tujuan tidak hanya dilakukan untuk memberikan arah bagi penyusunan strategi tetapi juga untuk membentuk aspirasi bagi perusahaan sehingga dapat dikatakan strategi sebagai target perusahaan.

5. Klasifikasi strategi

Dilihat dari tingkatan tugas strategi diklasifikasikan menjadi 3 jenis strategi menurut Grant dalam Panjarwanto (2016: 43) yaitu:

- 1) Strategi generik adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis.
- 2) Strategi utama merupakan strategi yang lebih operasional dan merupakan tindak lanjut dari strategi generik.
- 3) Strategi fungsional merupakan strategi yang bersifat spesifik serta terperinci tentang pengelolaan bidang-bidang fungsional tertentu, seperti bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang SDM, bidang pelayanan, dan sebagainya.

6. Proses Pembuatan Strategi

Menurut Udaya, dkk (2013:11-13) proses pembuatan strategi terdiri dari beberapa tahapan meliputi;

a. Merumuskan visi dan misi

Visi adalah keterangan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi perusahaan. Sedangkan misi adalah jawaban atau keterangan terhadap bagaimana visi tersebut akan dicapai. Misi menjelaskan keberadaan organisasi yang dinyatakan melalui pernyataan (*statement*) mengenai alasan keberadaannya serta mengemukakan produk, pasar, serta teknologi yang digunakan dalam melaksanakan misi. Visi dan misi merupakan dasar dari keberadaan sebuah organisasi/perusahaan, keberadaan visi dan misi akan memberikan arah ke mana perusahaan/organisasi itu akan dijalankan dengan cara bagaimana.

b. Analisis Lingkungan

Analisis lingkungan terdiri dari analisis secara internal dan eksternal. Analisis internal adalah kegiatan meninjau peluang dan kelemahan organisasi

dalam melaksanakan tugasnya, khususnya menyangkut sumber daya, keuangan, fisik dan manusia. Sedangkan analisis eksternal menyangkut analisis kondisi-kondisi yang terdapat di lingkungan eksternal yang dihadapi sebuah organisasi. Analisis eksternal menganalisis situasi jarak jauh, situasi industri.

c. Pilihan-pilihan Strategi

Setelah melakukan analisis lingkungan selanjutnya adalah harus memilih strategi mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi-strategi yang dipilih akan membawa kita dalam mencapai keunggulan bersaing

d. Strategi Implementasi

Setelah menyelesaikan dan menetapkan strategi yang dipilih pimpinan selanjutnya mengimplementasikan strategi-strategi yang sudah dipilih dengan melakukan sejumlah tindakan yang menyangkut perubahan-perubahan atau penyesuaian-penyesuaian dibidang struktur, budaya, dan kontrol. Implementasi strategi sering disebut sebagai tahapan tindakan dari manajemen strategi. Dalam implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan/organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan.

e. Evaluasi Strategi

Setelah strategi yang terpilih diimplementasikan. Hal yang harus dilakukan adalah mengevaluasi atas hasil pelaksanaan strategi-strategi tersebut. Apakah strategi tersebut mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Semua hasil evaluasi menjadi bahan pelaporan kepada pimpinan dengan demikian pimpinan

dapat memutuskan harus melakukan perubahan-perubahan dalam strategi yang ada untuk melanjutkan strategi-strategi yang sudah diterapkan selama ini. Hasil dari evaluasi dapat dikatakan sebagai umpan balik yang dianggap sebagai alat untuk meningkatkan pengambilan putusan yang lebih baik pada masa mendatang.

7. Perencanaan Strategi dalam Praktik

Perencanaan yang strategik akan membawa dampak positif terhadap kinerja organisasi/perusahaan. Agar sebuah perencanaan strategik dapat bekerja dengan baik, setidaknya para pemimpin perusahaan/organisasi tidak hanya berfokus pada situasi persaingan saat itu, tetapi juga mengantisipasi situasi pada masa mendatang. Dalam Udaya, dkk (2014:16) menjelaskan bahwa para pakar telah menyiapkan beberapa teknik untuk mengantisipasi lingkungan bersaing pada masa mendatang. Beberapa teknik yang terkenal adalah *Scenario Planning*, yang dikembangkan oleh General Electric, *Decentralized Planning* dan *Strategic Intent*, yang dikembangkan oleh Gary Hamel dan C.K. Prahalad.

Scenario Planning

Tidak semua rencana sebaik apapun yang dibuat manusia selalu berhasil, banyak hal menyebabkan kegagalan khususnya perubahan lingkungan memainkan peranan sangat penting terhadap kegagalan apabila para pimpinan tidak memperhatikan masalah lingkungan secara serius. Untuk mengantisipasi situasi-situasi yang tidak diinginkan pada masa mendatang dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin timbul di lingkungan. Menganalisis *Scenario Planning* menyangkut memformulasikan rencana-rencana berdasarkan skenario bilamana tidak pada masa datang. Artinya, bilamana lingkungan tidak sesuai

dengan rencana, apa yang harus dilakukan organisasi/perusahaan. Rencana didasarkan atas perkiraan yang optimistik dan pesimistik sehingga para pimpinan harus memberikan solusi terhadap situasi yang dianggap mungkin akan terjadi.

Keuntungan *Scenario Planning* adalah para manajer/pimpinan dipaksa untuk berpikir di luar lingkaran cara biasa berpikir dan mengetahui bahwa di luar itu terdapat situasi yang berbeda dengan yang biasa mereka pikirkan. Dengan demikian mereka harus menerima bahwa lingkungan diluar perusahaan dapat berbeda-beda dan berubah-ubah sehingga mereka harus dapat bertindak secara fleksibel, bukan menggantungkan diri pada rencana-rencana yang tidak mengantisipasi terjadi perubahan-perubahan tersebut sehingga tidak fleksibel.

Decentralized Planning

Kesalahan utama seringkali dilakukan adalah perencanaan hanya dibuat oleh *top manager*. Para manager atau pemimpin adalah putusan segala kepentingan perusahaan yang sering berada jauh diluar perusahaan/organisasi sehingga mengakibatkan rencana-rencana mereka sangat berbeda dengan keadaan sesungguhnya yang dihadapi. Akibatnya rencana-rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mengakibatkan kemunduran kinerja organisasi/perusahaan.

Untuk mengubah hal tersebut rencana-rencana harus melibatkan semua lapisan manajer perusahaan, dari lapisan atas sampai lapisan bawah. Ini berarti bahwa pembuatan rencana harus di desentralisasikan. Para manajer/pemimpin membuat rencana-rencana strategis yang menyangkut tujuan yang ingin dicapai. Namun mengikutsertakan para manajer/pemimpin tingkat bawah saja tidak cukup

untuk memastikan kinerja mereka baik, tetapi mereka juga harus mempunyai pandangan bahwa putusan-putusan yang diambil masuk akal dan jujur.

Strategic Intent

Dasar konsep *Strategic Intent* adalah penetapan sebuah visi serta tujuan-tujuan yang ambisius yang menyebar di perusahaan atau organisasi dan kemungkinan mencari cara-cara untuk membangun sumber daya serta kapabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Proses perencanaan stratejik harus dimulai dari penetapan sebuah visi yang menantang. Dalam proses selanjutnya pemimpin harus mencari strategi untuk mengembangkan sumber daya serta kapabilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut daripada hanya menggunakan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya untuk memanfaatkan peluang yang ada.

B. Pengembangan Ekonomi Lokal

1. Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal

Pemeran utama dalam melakukan pembangunan ekonomi yaitu pemerintah daerah atau pemerintah lokal yang ada didalamnya. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui strategi pembangunan yaitu pengembangan ekonomi lokal (PEL). Menurut Blakely (1994) dalam Kurniawati (2016:37) mengartikan pengembangan ekonomi lokal (PEL) sebagai suatu proses pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat berperan aktif mengelola sumberdaya alam yang dimiliki melalui pola kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya. Menciptakan lapangan pekerjaan, memberikan

stimulasi kegiatan ekonomi pada zona perekonomiannya. Pengembangan ekonomi lokal merupakan kegiatan pemerintah dan masyarakat (penduduk lokal) yang bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatkan ekonomi lokal.

Menurut Saragih (2015:55) tujuan utama pengembangan ekonomi lokal adalah untuk merangsang kesempatan kerja lokal pada suatu sektor tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Selain itu, menurut Munir dalam Susanti (2014: 33) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan - kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Dari beberapa definisi Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) adalah proses pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau kelompok masyarakat bersama-sama melaksanakan suatu kegiatan atau aktivitas dalam meningkatkan ekonomi lokal dengan mengelola sumberdaya alam guna menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi lokal dilakukan untuk peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal.

Pengembangan ekonomi lokal (PEL) mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Pengembangan Ekonomi Lokal untuk mengatasi masalah kemiskinan. Pendekatan ini pada intinya berfokus pada:

- a. Pemasaran dan ekspor pengembangan kegiatan ekonomi lokal perlu berorientasi kepada pemasaran dan ekspor. Hal ini penting karena berbagai program selama ini hanya berorientasi pada peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan pemasarannya, sehingga akhirnya berhenti ditengah jalan. Selain itu prioritas perlu diberikan kepada kegiatan yang tidak bermuara kepada ekspor, apalagi konsumsi lokal, tidak akan memperbesar “kue”, sehingga akibatnya hanya bersifat “*zero sum game*” (membantu yang satu, mematikan yang lain).
- b. Pengembangan klaster (*cluster development*) untuk mendukung pemasaran dan ekspor tersebut, perlu dikembangkan mata rantai kegiatan ekonomi hulu-hilir (*supply chain*) yang efisien dan efektif, agar daya saing produk yang dihasilkan meningkatkan. Pengembangan ekonomi lokal sebaiknya dimulai dari mata rantai produk yang saat ini terbukti dapat diandalkan untuk ekspor, dan multiplier effectnya luas, sehingga hasilnya dapat segera dirasakan oleh partisipan dan stakeholders secara luas. Dengan demikian, konsep yang diharapkan akan lebih mudah diterima dan direplikasikan kepada mata rantai kegiatan ekonomi lain.
- c. Kemitraan *stakeholder*. Mata rantai menuju kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan penunjangnya akan sulit terwujud dan bersinergi tanpa adanya spirit kemitraan antar pelaku dan para stakeholdersnya. Untuk mengembangkan kemitraan yang efektif dan berfungsi baik, perlu memupukkan modal sosial (*socia capital*) yang dibutuhkan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara pelaku dan stakeholders. Kemitraan yang dikembangkan tidak hanya antar pelaku ekonomi, melainkan juga antara pelaku ekonomi (swasta) dengan pemerintah , antar unit/lembaga pemerintah, serta antar daerah.
- d. Pemberdayaan forum kemitraan antar pelaku dan stakeholders tersebut tidak akan efektif tanpa adanya “pemberdayaan”, yaitu kerelaan dari pemerintah daerah untuk memberi keleluasaan bagi forum kemitraan atau pelaku ekonmi umumnya untuk mengatur dirinya sendiri, terutama pemberdayaan masyarakat juga menjadi point penting dalam pengembangan ekonomi lokal. Disini peran pemerintah ialah sebagai “*steering rather than rowing*” Arsyad dalam Kurniawati (2016:38-39)

Pendekatan dan strategi Pengembangan Ekonomi Lokal menurut Supriyadi (2007: 107) berpendapat bahwa pendekatan dan strategi PEL dapat dilihat dalam delapan dimensi perencanaan wilayah, yaitu rasionalitas keputusan, fokus dan perencanaan, dasar pemikiran aliran filsafat, kedudukan negara dan komunitas, peran negara dan perencanaan, orientasi publik, tingkat kebebasan berfikir/bertindak, dan arah pengembangan wilayah atau kota.

Menurut Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007, h.103-123) dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

- 1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha;
- 2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan;
- 3) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan
- 4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Revitalisasi pengembangan ekonomi lokal (PEL) bertujuan untuk mengubah paradigma pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai instrument untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang berkelanjutan.

2. Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal

Konsep yang digunakan untuk pengembangan wilayah yang berbasis ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada kondisi

yang sesuai dengan keadaan lingkungan atau daerahnya sesuai dengan kapasitas lokal yang semakin berkembang. Prinsip utama dalam implementasi pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah kerjasama pemerintah dengan swasta. Menurut Chura dan Orozobekov dalam Saragih (2015:59-60) PEL mengutamakan peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga, pengurangan kemiskinan dan pengangguran kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi perlu dilakukan mulai dari tingkat lokal dan penduduk lokal sehingga pembangunan ekonomi lokal dapat memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut. Menurut Saragih (2015:60) :

Peran Pemerintah lokal dalam PEL adalah menciptakan kondisi yang baik bagi berkembangnya wirausahawan dan meningkatnya pembangunan lokal. Peran pemerintah lokal bukan membentuk perusahaan baru, tetapi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peran pemerintah lokal untuk bertahan bahkan memperluas aktivitas mereka serta menarik investor dari luar wilayah. Dengan demikian, untuk menggerakkan PEL perlu dilakukan lima tahapan :

1. Pengorganisasian.
2. Evaluasi strategi sebelumnya.
3. Menyusun rencana strategik untuk pembangunan ekonomi lokal.
4. Menciptakan sistem PEL dan mengimplementasikan rencana strategik, dan
5. Monitoring dan evaluasi

Dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal memiliki tujuan dari pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal yaitu untuk meningkatkan peluang kerja yang tersedia di sekitar kawasan kegiatan kepariwisataan. Sehingga dari adanya pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki pada suatu daerah di mana kegiatan kepariwisataan tersebut berada, maka dapat meningkatkan jenis peluang kerja pada proses jangka panjang nantinya. Peluang kerja yang telah didapatkan

3. Prinsip-prinsip Pembangunan Ekonomi Lokal

Di dalam pembangunan ekonomi lokal terdapat prinsip-prinsip yang dapat mendukung tercapainya pembangunan ekonomi lokal. Berikut ini terdapat beberapa prinsip dari pembangunan ekonomi, lokal menurut Organisasi Perburuhan Internasional dalam Kurniawati (2016:42) :

- a. Partisipasi dan dialog sosial: keterlibatan pihak-pihak lokal yang terkait dalam proses pembangunan di wilayahnya sendiri merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penggunaan mekanisme partisipatif mengurangi risiko konflik dan membangun kohesi sosial. Mengupayakan pihak-pihak yang berkepentingan bertemu disatu meja melalui forum lokal akan membantu terbentuknya kepercayaan. Mendorong inovasi dan meningkatkan penciptaan jaringan dan kegiatan sosial. Desain dan implementasi strategi dari bawah ke atas selanjutnya menjamin solusi yang paling sesuai untuk kebutuhan lokal dan merupakan jaminan bagi berkelanjutan proses pembangunan.
- b. Kemitraan publik/swasta: investasi pelengkap yang ditargetkan seakurat mungkin akan mendatangkan tingkat pengembalian sosial ekonomi yang tinggi. PEL adalah cara untuk mencapai mobilisasi sumber daya lokal dengan mendorong pengalokasian yang efisien. Maka kemitraan antara swasta, publik, dan sektor nirlaba menjadi krusial dalam proses pembangunan berkelanjutan, yang memungkinkan konvergensi dalam pemrograman investasi antara lokal yang berbeda. Kerjasama dan koordinasi kegiatan pembangunan mencegah pendekatan “masing-masing” yang tidak efektif dan mendukung legitimasi dan berkelanjutan proses pembangunan.
- c. Wilayah: kedekatan geografis dan budaya mendukung seperangkat kondisi yang ideal untuk pertumbuhan, inovasi dan pembangunan, pertama pihak terkait dari wilayah yang sama mempunyai pengetahuan yang lebih baik akan kebutuhan dan sumber dayanya. Kedua, wilayah lebih memungkinkan adanya kepentingan yang sama dan kedekatan kultural. Ketiga, wilayah memungkinkan terjadinya interaksi sosial, ekonomi dan politik yang sering antar aktor daerah, sehingga menghasilkan kohesi dan kepercayaan sosial. Terakhir adalah platform yang ideal bagi terciptanya suara daerah yang kuat atas nama semua pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan pendekatan pembangunan masyarakat yang tradisional, PEL memberikan cara dan struktur yang mewakili suatu daerah bilamana menghadapi mitranya ditingkat nasional dan internasional.

Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal memberi kerangka kerja inisiatif dan tindakan yang komprehensif untuk menjawab kebutuhan untuk mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan dari pembangunan di tingkat daerah.

C. Teori Pilihan Rasional

Menurut Wijaya dan Danar (2014:35-37) teori pilihan rasional adalah perilaku politik yang dalam asumsi sederhana bahwa aktor politik, termasuk didalamnya birokrasi dan masyarakat adalah instrumental, hanya melayani dan memaksimalkan perilaku kepentingan dirinya sendiri. James Buchanan (dalam Wijaya dan Danar : 2014) menyatakan bahwa teori pilihan rasional merupakan teori ekonomi neoklasik yang di aplikasikan dalam sektor publik. Teori ini kemudian berkembang dan belakangan populer dengan sebutan teori pilihan publik.

Karakteristik inti dari teori pilihan rasional dipisahkan dari pendekatan politik tradisional dan teori administrasi publik adalah penekanannya pada rasionalitas, mengenai aktor yang memiliki kepentingan pribadi. Berdasarkan teori Smith, masyarakat dan birokrat dalam konteks ini di asumsikan bahwa mereka masyarakat dan birokrat diikat karena termotivasi oleh keinginan untuk menguntungkan diri mereka sendiri. Teori pilihan rasional dan pengambilan keputusan memperkenalkan konsep individualis moralitas baru, yakni, pandangan pada perilaku manusia yang rasional.

Adam Smith (dalam Wijaya dan Danar: 2014:36) menjelaskan fenomena ekonomi dalam karyanya "*the Wealth of Nations*" yang menyebutkan bahwa setiap individu tertarik dan hanya akan mengejar manfaat bagi dirinya sendiri, meskipun dengan demikian seringkali 'diarahkan oleh yang 'tak terlihat'... tanpa mengetahuinya, tanpa menyadarinya atau bahkan tanpa bermaksud untuk kepentingan dirinya..' dan berdalih melakukannya untuk memajukan kepentingan masyarakat. Meskipun Adam Smith masih berpendapat bahwa kesejahteraan masyarakat sangat terkait antara satu dengan yang lain, antara lain, pada hukum dan lembaga publik, pengikutnya berkonsentrasi sepenuhnya pada bagaimana mengoptimalkan kegiatan individu, yaitu bagaimana untuk mencapai keuntungan maksimum pada biaya minimum.

D. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa:

"Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan".

Pengertian lain mengenai pemerintah daerah menurut Husein dalam Indriana (2015 : 26) mengungkapkan bahwa *local government* merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti.

- a. Pertama, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ, yakni *council* dan *mayor* dimana rekrutmen penjabatnya didasarkan pemilihan.
- b. Kedua, ia mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi. Dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdapat dua prinsip yang lazim dipergunakan. *The ultra vires doctrine* menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu dan memberikan pelayanan tertentu saja, fungsi atau urusan pemerintah bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat. Prinsip *general competence* atau *open arrangement* merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya tersebut. Pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu, pemerintah pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang terinci, sementara sisanya merupakan fungsi atau urusan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah (Hoessei, 2001b; Smith,1985:87).
- c. Ketiga, ia bermakna daerah otonom. Hoessein (20001c) menjelaskan bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menerima menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang bertindak sebagai pemimpin dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kepala daerah disini adalah seorang Gubernur ditingkat Provinsi, seorang

Bupati atau Walikota ditingkat Kabupaten atau Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah secara etimologis berasal dari kata *autos* (bahasa latin) dan *nomos* (bahasa yunani). *Autos* memiliki arti sendiri sedangkan *nomos* memiliki arti aturan jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara etimologis berarti “memerintah sendiri” atau “pemerintahan sendiri” yang artinya pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Menurut Hendratno (dalam Indriana 2015:27) inti pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya kebebasan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6). Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan pada setiap daerah mempunyai tujuan untuk mempermudah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat daerah. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah diharapkan mampu memberikan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah

Menurut Adam Smith dalam bukunya *wealth of nations*, dalam Indriana (2015:28) bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya, dan sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Pandangan ini menempatkan peran pemerintah secara terbatas hanya pada pertahanan, pengadilan dan polisional belaka. Pendapat tersebut relevan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 65 ayat (1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. Mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa tugas pemerintah daerah tidak hanya menyusun dan mengajukan rancangan Perda terkait daerahnya, tetapi pemerintah daerah juga bertugas untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat di daerahnya dari

ketidakadilan dan tekanan serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan uraian tugas dari pemerintah daerah diatas. Peran pemerintah daerah juga memiliki fungsi. Menurut Musgrave & Musgrave dalam Indriana (2015:28) mengungkapkan bahwa peran pemerintah terbagi menjadi tiga fungsi pemerintah yaitu:

a. Fungsi Alokasi

Dalam hal ini pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods*, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan baik sebagai *private* maupun *public* menentukan komposisi dari *public goods*. Regulasi yang dilakukan pemerintah juga termasuk dalam fungsi alokasi.

b. Fungsi Distribusi

Dalam fungsi ini merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata.

c. Fungsi Stabilisasi

Mengenai fungsi yang ini merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi. Tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

E. Industri

1. Pengertian Industri

Industri adalah kegiatan dibidang ekonomi yang juga dapat berpengaruh terhadap pembangunan daerah dan sangat penting, karena industri merupakan penghasil sebagian besar kebutuhan hidup manusia yang meliputi sandang, pangan dan papan. Industri kecil juga merupakan bagian dari industri yang ikut dalam memberikan masukan bagi perekonomian. Pengertian industri dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah “seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau

memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau mamfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri., Menurut Udaya dkk (2013:60), industri adalah kumpulan perusahaan yang memproduksi dan menjual produk-produk sejenis dalam sebuah dalam sebuah pasar yang sama. Perusahaan-perusahaan tersebut akan saling bersaing untuk merebut pangsa pasar dari produk yang sama atau sejenis.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menjelaskan bahwa perindustrian sebagai tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Dalam pembukaan Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa pembangunan industri yang maju dapat diwujudkan melalui beberapa hal yakni, melalui penguatan struktur industri yang mandiri, sehat, dan bersaing, dengan mendayagunakan sumberdaya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berlandaskan pada kerakyatan dan keadilan dan nilai-nilai luhur adanya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional. Untuk mewujudkan industri yang maju dapat ditempuh dengan memperkuat posisi industri disetiap daerah.

2. industri Kecil

Menurut Lincoln Arsyad (dalam Rini 2015:36), industri secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- a) Industri dasar yang meliputi industri mesin dan logam dasar (IMLD) dan kelompok industri dasar (IKD), yang termasuk dalam IMLD antara lain : industri mesin pertanian, elektronika, kereta api, pesawat terbang

dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk IKD antara lain : industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batu bara, dan lain sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri dan bersifat padat modal. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara sejajar dengan tumbuhnya industri hilir dan kegiatan ekonomi lainnya.

- b) Industri kecil yang meliputi antara lain: industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik, dll), industri kerajinan umum (industri kayu, rotan, bamboo, dan galian bukan logam), dan industri logam. Kelompok industri kecil mempunyai misi melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan teknologi menengah atau sederhana, dan padat karya. Pengembangan industri kecil diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.
- c) Industri hilir yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi antara lain : industri yang mengolah sumber daya hutan, hasil pertambangan, mengolah sumber daya pertanian secara luas. AI mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi , memperluas kesempatan kerja,

tidak padat modal dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan atau maju.

Keberadaan industri kecil tidak lepas dari pemerintah, mengacu pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 “Usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut”. Adapun kriteria usaha kecil dilihat dari segi keuangan dan modal yang dimiliki menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6 adalah :

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha: atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

F. Perkembangan Industri Batik

1. Pengertian Batik

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) atau dikenal UNESCO, pada tanggal 2 Oktober 2009 menetapkan

batik sebagai warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia dan setiap tanggal 2 Oktober ditetapkan menjadi “Hari Batik” di Indonesia. Pengertian batik secara umum adalah sejenis kain yang memiliki motif polos yang kemudian ditulis motif-motif menggunakan malam` (lilin) yang digambarkan di atas kain, kemudian tahap selanjutnya adalah menyelupkan kain kedalam pewarna dan diproses dengan cara tertentu. Kata “ Batik” berasal dari gabungan dua kata bahasa jawa “amba”, yang bermakna “menulis” dan “tik” yang bermakna “titik”. Batik yang terkenal ada dua macam, yakni batik cap dan batik tulis. Batik cap dibuat dengan alat cap, sedangkan tulis dibuat langsung dengan tangan.

Batik mempunyai makna yang mendalam dengan adanya sejarah didalamnya, yang menjadi ke istimewaan dari batik. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Wulandari (2011:9) yang menyatakan bahwa:

“batik bukanlah kain bercorak yang tak punya makna. Dibalik setiap motif ada jenisnya dan filosofis yang memiliki nilai dan sejarah yang panjang. Corak dan motif batik tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur yang melekat dari wilayah asal pembuatannya. Selain adanya makna filosofis di dalamnya sesuai dengan corak dan motifnya, batik juga memiliki sejarah panjang di Indonesia.”

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa batik adalah kain polos yang diberikan motif dengan digambar langsung atau dicap menggunakan malam yang dilanjutkan pada proses selanjutnya sehingga menjadi kain yang bermotif dan berwarna, pada kain batik terdapat nilai yang terkandung yang tertuang melalui motif-motif yang dihasilkan.

2. Sejarah Batik di Indonesia

Batik Indonesia memiliki sejarah sebelum menjadi terkenal dan meluas seperti saat ini. Menurut Wulandari (2011:12) menyatakan bahwa:

“batik semakin eksis pada masa keraton Majapahit wilayah dan kekuasaan yang sangat luas, namun data yang lebih pasti tentang sejarah dan perkembangan batik di Indonesia mulai terekam jelas sejak masa Kerajaan Mataram Islam, yang bersumber dari keraton, seperti motif parang rusak, semen rama, dan lain-lain.”

Menurut salah satu sumber yang dijelaskan dalam buku terbitan bagian Humas dan Protokol Setda Pamekasan berjudul “ Pamekasan Membatik”, pada tahun 1873 Van Rijekevorsel seorang saudagar Belanda, menyerahkan ke Museum Etnik Rotterdam selembar batik yang diperolehnya ketika berkunjung ke Indonesia. Kemudian batik tersebut pada tahun 1990 dipamerkan di Exposition Universelle di Paris dan memukau publik utamanya para seniman. Pada zaman kemerdekaan batik dikenalkan kepada dunia oleh presiden Soekarno yang memakai batik pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seni batik berkaitan erat dengan kerajaan Majapahit dan penyebaran Islam di Jawa, sehingga dapat dikatakan seni batik berawal dari lingkungan kraton. Namun seiring perkembangan jaman, batik menjadi lebih maju lagi dengan dikenalnya media kain yang sebelumnya masih menggunakan daun lontar. Setelah batik menggunakan kain, maka batik berkembang berkembang di kerajaan sebagai busana penguasa kerajaan atau busana tradisional. Menurut Wulandari (2011-12) menyatakan bahwa:

“Dalam beberapa literatur, sejarah pembatikan di Indonesia sering dikaitkan dengan kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan penemuan acra dalam Candi Ngrimbi dekat Jombang yang menggambarkan sosok Raden Wijaya, raja pertama Majapahit (memerintah 1294-1309), memakai kain batik kawung.”

Batik pada masa sekarang sudah mengalami perubahan ke arah yang lebih populer. Batik sekarang dapat digunakan sebagai busana atau baju secara menyeluruh oleh semua kalangan. Selain bisa digunakan sebagai baju, batik juga dibuat barang lainnya yang mempunyai nilai tinggi seperti kerajinan-kerajinan yang berbahan batik misalnya, tas, dompet, sprei, mukenah, lukisan, taplak dan kerajinan lainnya.

Berdasarkan pernyataan di atas secara keseluruhan dari sejarah batik di Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa batik pertama kali dikenalkan pada jaman kerajaan keraton dan mulai dikenal dunia ketika Presiden Soekarno mengenakan baju batik di Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Batik juga mulai dikenal dan disebarkan seiring peyebaran Islam di Jawa. Setelah mengalami perubahan era sekarang batik lebih menyeluruh dan meluas di semua kalangan. Batik tidak hanya di buat sebagai baju tetapi benda atau kerajinan yang mempunyai nilai yang tinggi dan indah.

3. Industri Batik di Indonesia

Perkembangan batik pada era modern ini sangatlah pesat. Perkembangan tersebut dikaitkan dengan banyaknya industri-industri yang tertarik dengan batik. Para pengusaha dan pengrajin di Indonesia banyak yang tertarik menjadi pengusaha dan pengrajin batik dikarenakan semakin banyaknya ragam hias yang turut memperkaya motif batik Indonesia, sehingga batik semakin banyak diminati

oleh masyarakat, pendapat ini didukung oleh pendapat Wulandari (2011:157)

yang mengatakan bahwa:

“Ragam hias yang bermacam-macam turut memperkaya motif kain batik yang lama ada di Indonesia. Industri batik di Indonesia muncul sejak adanya tradisi membatik di Nusantara. Dengan perjalanan panjang industri batik Indonesia tetap eksis hingga sekarang. Apalagi setelah mendapat pengakuan dari PBB bahwa batik menjadi warisan budaya Indonesia, membuat semangat baru masyarakat untuk terus melestarikan dan mengembangkan batik”.

Jenis industri batik sangat beragam, baik industri kecil, industri menengah hingga industri besar. Setelah berhasil menarik minat masyarakat untuk menggunakan batik, ternyata batik Indonesia juga mempunyai peluang yang besar dalam memperkenalkan batik ke luar negeri melalui ekspor. Anggapan bahwa batik Indonesia memiliki kualitas yang baik dan bagus, membuat permintaan luar negeri akan batik Indonesia terus meningkat. Hal yang menyebabkan batik bisa diminati oleh bangsa asing adalah karena kelebihan dari batik Indonesia tidak dimiliki oleh negara-negara asing.

Menurut Wulandari (2011:163) mengatakan bahwa, kelebihan batik Indonesia dibandingkan dari batik negara lain adalah keragaman motif dan desain penggarapannya yang cenderung halus, mengingat Indonesia adalah negeri batik yang sudah ratusan tahun mengenal dan mengembangkan batik. Menurut Wulandari (2011:167) menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh industri batik antara lain:

“ a) adanya pasar global menyebabkan produk-produk dari luar negeri. jual yang lebih murah dan dengan berbagai corak dan motif, b) dari segi teknologi, industri batik di Indonesia masih kalah jauh dengan industri pembatikan di negara lain, c) ketersediaan bahan baku masih terbatas, d) pemasaran masih sangat biasa, belum fokus pemasaran untuk mengangkat batik Indonesia sebagai high

internasional fashion, e) permasalahan hak kekayaan intelektual motif batik, dan f) sumber daya manusia (sdm).”

Untuk menghadapi hambatan dan tantangan tersebut harus ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat. Menurut Wulandari (2011:168) Upaya-upaya yang dilakukan tersebut antara lain: a) adanya sekolah dan kursus informal pembatikan, b) pemerintah telah mendokumentasikan motif-motif batik indonesia, ada sekitar 3000 motif yang telah di dokumentasikan, c) pameran-pameran tekstil internasional, d) pembukaan gerai-gerai batik, e) ekspor batik, f) pengiriman tenaga-tenaga ahli batik untuk memberikan pembelajaran dan pengajaran tentang batik ke luar negeri, g) penerbitan buku-buku berbahasa inggris tentang batik, h) pengenalan adanya industri dan wisata batik di indonesia, dan i) meningkatkan mutu, menambah pelayanan prima, dengan harga yang bersaing sehingga pelanggan tetap memilih produk-produk batik indonesia.

4. Batik Madura

Seiring berkembangnya sejarah, orang Madura juga sudah mengenal dan akrab dengan batik. Batik dipergunakan kaum perempuan madura dalam kesehariannya yang berupa kain panjang atau sarung yang disebut dengan “samper” atau “sarong bine’ “. Sedangkan untuk laki-laki motifnya berbeda yaitu identik dengan motif “kotak-kotak” yang disebut “sarong plekat” atau kembang-kembang yang disebut “sarong guyur”. Kaum lelaki Madura jelas berbeda dengan kaum lelaki Jawa lainnya yang biasa memakai sarung bermotif batik.

Batik Madura sebagaimana di Jawa, mempergunakan bahan kain mori bukan tenun. Pada masa selanjutnya sebagaimana di daerah lainnya, batik berkembang menjadi “multifungsi” dan bercorak “uni-sex”. Kain batik tidak lagi dipakai hanya untuk kain panjang dan sarung kaum perempuan, melainkan juga untuk rok, blus dan baju begitu pula kaum lelaki. Para pengrajin batik kemudian mengembangkan kerajinan batik untuk taplak, sprei dan bantal kursi. Batik semakin menjadi ekspresi seni yang tidak lagi anonim, berfungsi tidak sebagai kostum semata, namun juga sebagai dekorasi, barang seni, ataupun cinderamata. Batik tulis Madura mulai masuk pasar dalam negeri yang dipelopori oleh batik yang berasal dari Kecamatan Tanjung Bumi.

Menurut Az. Alim dalam buku terbitan Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pamekasan (2016), menjelaskan batik Tanjung Bumi yang identik dengan batik Madura, mulai dikenal dunia luar sekitar 1970-an. Ciri khas batik Tanjung Bumi sebagai batik pesisiran adalah warnanya yang tampil berani dan memikat serta coraknya yang bebas. Batik Madura eksotik dan memiliki pesona tersendiri. Mengiringi majunya batik Tanjung Bumi, batik juga ada di tiga Kabupaten lainnya. Di Sampang, batik tulis berkembang dengan baik dengan memiliki pola tersendiri yang menjadi ciri khasnya. Demikian halnya di Sumenep, batik tulis juga berkembang yang kemudian berpusat di Desa Pakandangan, Kecamatan Prenduan yang memperoleh pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Di Pamekasan, sentra batik merupakan lahan yang subur dan berkembang hampir diseluruh wilayah kabupaten batik menjadi komoditas andalan bahkan

menjadi ikon industri kecil. Keunggulan batik Madura ada pada permainan warna yang ekspresif. Batik madura identik dengan warna yang mencolok adalah “merah” dan warna “kelenteng” yaitu dominasi warna merah, hitam dan parada emas, pada perkembangannya karena respon permintaan pasar muncul warna lembut, akan tetapi dominasi masih tetap pada warna yang menantang. Kelebihan lainnya dijelaskan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Pamekasan (2016) adalah dipertahankannya pengerjaan dengan tangan langsung dan cara menggambar secara spontan. Maksudnya, motif tetap ada akan tetapi para pembatik ketika membatik, tidak memakai pola, karena itu tidak akan ditemukan dua lembar kain batik Madura yang persis sama meskipun motifnya sama, kecuali memang khusus dipesan.

Dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya, prospek perkembangan Batik Madura ke depan diperhitungkan akan cerah. Dalam kaitannya batik Madura juga memperoleh sambutan yang baik dari para pencinta busana batik. Salah satu hal yang harus untuk memastikan batik madura mempunyai posisinya sendiri adalah membuka pasar yang lebih luas lagi, termasuk pasar luar negeri. Untuk itu dibutuhkan hubungan dengan para eksportir yang sudah memiliki pengalaman dalam perdagangan dalam negeri. Hal penting lainnya adalah menjaga mutu terkait dengan penggunaan bahan ataupun waktu pemrosesan. Hal berikut juga tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan keunggulan yang berupa kekhasan corak batik Madura.